

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	5
	1.3 Maksud dan Tujuan	8
	1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II	EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT TAHUN LALU	10
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD.	10
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
	2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	34
	2.4 Review Terhadap RKPD.	37
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	47
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
	3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	48
	3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	50
	3.3 Program dan Kegiatan	51
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	61
BAB V	PENUTUP	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

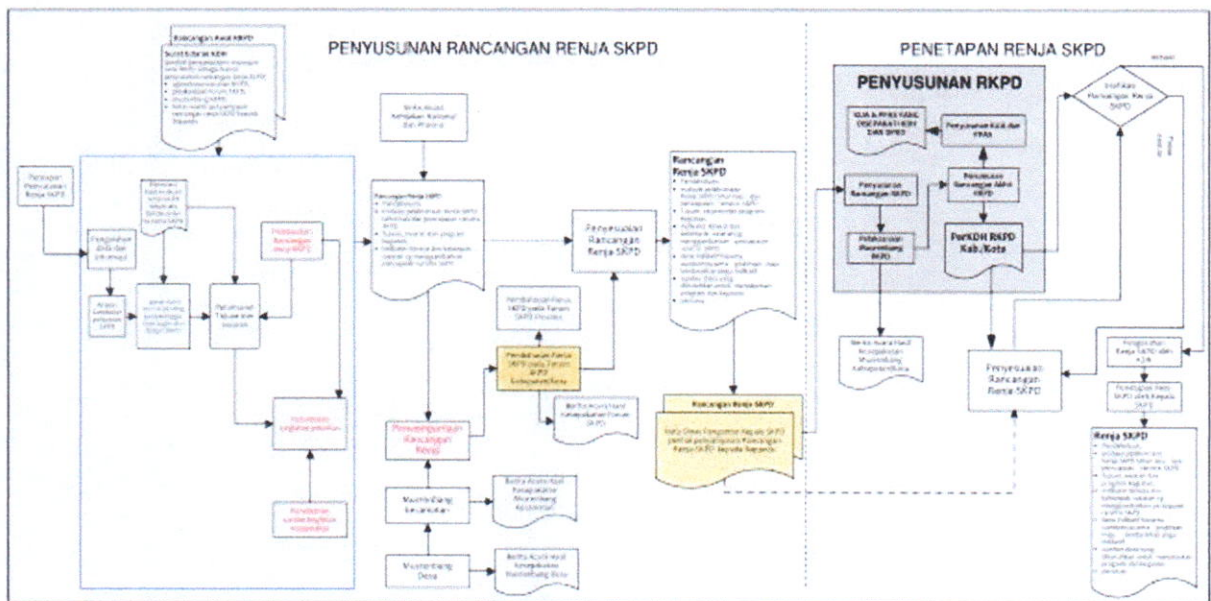
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan Kabupaten untuk mewujudkan keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan :

1. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu
2. kerangka pendanaan dan pagu indikatif
3. urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja PD Kabupaten/Kota

Sumber Data : Permendagri 86/2017

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja
 - Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - Orientasi mengenai Renja;
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja;

- Pengumpulan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Penyusunan Rancangan Renja
 - Pengolahan data dan informasi;
 - Analisis gambaran pelayanan PD;
 - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan;
 - Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
 - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
 - Telaah terhadap rancangan RKPd;
 - Perumusan tujuan dan sasaran;
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - Perumusan kegiatan prioritas Rencana Kerja;
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD;
 - Penyempurnaan rancangan kerja PD;
 - Pembahasan forum PD;
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
 3. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja;
 4. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPd;
 5. Penetapan Renja.

Pada perencanaan tahun 2024 di Kabupaten Purworejo ini telah menggunakan aplikasi SIPD RI dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Implementasi aplikasi SIPD merupakan wujud perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sehingga diharapkan perencanaan dan penganggaran yang disusun lebih akurat dan akuntabel.

Adapun Agenda Kerja yang telah dilalui dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Dinas PMPTSP Kab. Purworejo Tahun 2024

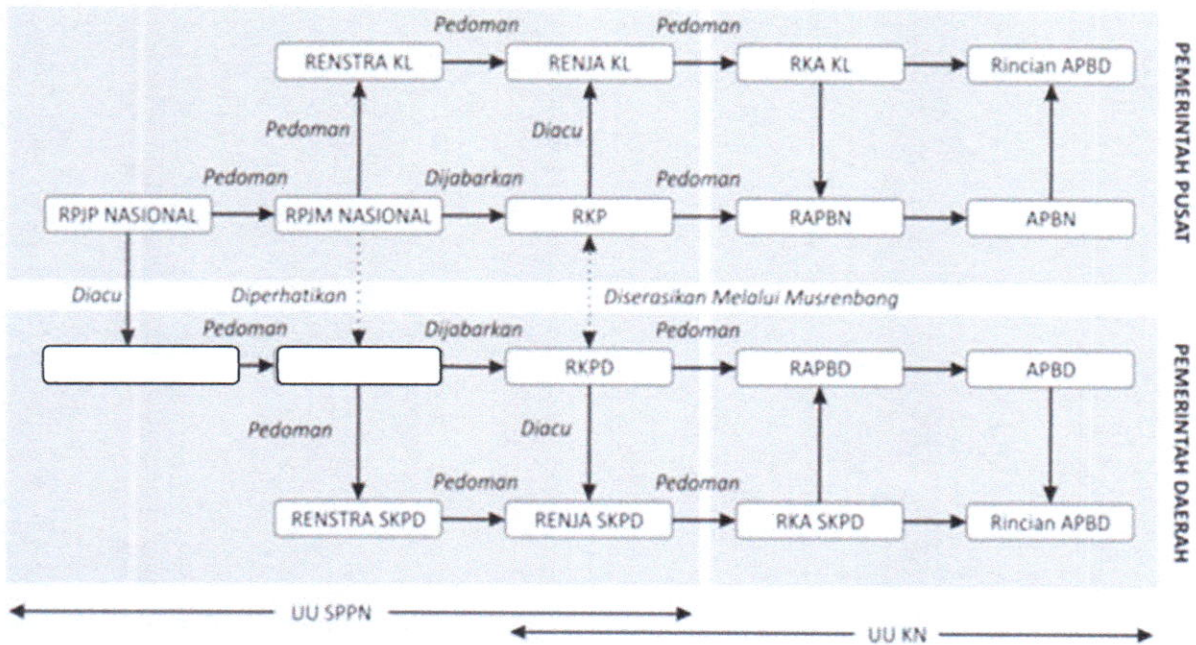
NO	TAHAPAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Persiapan Penyusunan	Minggu ke-2 November 2022
2.	Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Minggu ke-1 Desember 2022
3.	Forum Perangkat Daerah	Minggu ke-2 Februari 2023
4.	Penyampaian Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Minggu ke-1 Maret 2023
5.	Verifikasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Maret 2023
6.	Penyusunan dan Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Juli 2023
7.	Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Juli 2023
8.	Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Akhir Juli 2023

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Perangkat Daerah karena Renstra merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang mana RKPD disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo 2016 – 2023 dan mempedomani Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi

dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Apabila diilustrasikan dengan gambar, Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1.2 Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Sumber Data : Permendagri 86/2017, Permendagri 22/2018

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2023 adalah :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 1781 Tahun 2020);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
17. Peraturan daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Purworejo (lembaran daerah kabupaten purworejo tahun 2021 nomor 14 seri e nomor 8);
18. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
19. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (seri D nomor 44);
20. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026;

21. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 (seri E Nomor 34).
22. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2024 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kabupaten dalam rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam Rencana strategis Perangkat Daerah jangka pendek (1 tahun).
2. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.
3. Menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo pada tahun 2024.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.
3. Mempermudah dalam monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program / kegiatan dinas tahun 2024.
4. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam satu tahun secara efektif dan efisien.
5. Mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai hasil secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum Penulisan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan Renja dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan perangkat daerah yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Bila berdasarkan hasil evaluasi oleh Bappedalitbang ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, maka Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Evaluasi Renja tahun lalu atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. Capaian hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tahun 2022, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Purworejo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/ d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/ d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4
2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	100 %	7 Dokumen	100 %	100 %	100%	100%	25
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	100 %	16 Dokumen	100 %	100 %	100%	25
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	100 %	100 %	100%	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/ d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	100 %	100 %	100%	100%	25
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	100 %	100 %	100%	100%	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/ d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	100 %	100 %	100%	100%	25
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	100 %	16 Laporan	100 %	100 %	100%	100%	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/ d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4
2	18 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	100 %	5 Laporan	100 %	100 %	100%	100%	25
2	18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	25
2	18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/ bulan	100 %	Orang/bul	100 %	100 %	100%	100%	25
2	18 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	100 %	6 Laporan	100 %	100 %	100%	100%	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (R enstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/ d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target R enstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target R enstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/ 4
2 18 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24 Laporan	100 %	24 Laporan	100 %	100 %	100%	100%	25
2 18 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	100 %	100 %	100%	100%	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/ d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4
2 18 01 2.05	Administrasi K epegaw aian Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi K epegaw aian Perangkat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%		
2 18 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	100 %	20 Orang	100 %	100 %	100%		
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	25
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100 %	1 Laporan	100 %	100 %	100%	100%	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/ d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %		100 %	100 %			
2 18 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	905 Unit	100 %	905 Unit	100 %	100 %			
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	100 %	3 Laporan	100 %	100 %	100%	100%	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/ d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	100 %	1 Laporan	100 %	100 %	100%	100%	25
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	100 %	100 %	100%	100%	25
2 18 01 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	100 %	100 %	100%	100%	25
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	100 %	2 Jenis	100 %	100 %	100%	100%	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/ d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4
2 18 01 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	100 %	8 Unit	100 %	100 %	100%	100%	25
2 18 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	80 Unit	100 %	80 Unit	100 %	100 %	100%	100%	25
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	5 %	100 %	5 %	100 %	100 %	100%	100%	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/ d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/ 4	
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersusunnya Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	100 %	100 %	100%	100%	25
2	18	02	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	100 %	100 %	100%	100%	25
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten						100%	100%	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/ d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4		
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang umlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota					100%	100%	25		
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan	99,5 %	100 %	99,5 %	100 %	100 %	100%	25	
2	18	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Izin Usaha Terhadap Kepeminatan Penanaman Modal	99,5 %	100 %	99,5 %	100 %	100 %	100%	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/ d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4
2 18 03 2.01 1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	100 %	100 %	100%	100%	25
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	100 %	100 %	100%	100%	25
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/ d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1				2				3		4				
5				6				7		8=(7/6)				
9				10 = (5+7+9)				11=10/ 4						
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	25	
2	18	04	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	100 %	0 Pelaku Us	100 %	100 %	100%	100%	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/ d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4				
2	18	04	2.01	02	Pemanfaatan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemanfaatan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	20 Kegiatan Usaha	100 %	Kegiatan Us	100 %	100 %	100%	100%	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/ d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20 Orang	100 %	20 Orang	100 %	100 %	100%	100%	25
2 18 04 2.01 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	30 Kegiatan Usaha	100 %	Kegiatan Us	100 %	100 %	100%	100%	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/ d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Usaha Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	25
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Ketentuan Perizinan Berusaha	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	25
2 18 05 2.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	8 Pelaku Usaha	100 %	249 Pelaku Usaha	100 %	100 %	100%	100%	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4
2	18 05 2.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	49 Kegiatan Usaha	100 %	8 Kegiatan Usaha	100 %	100 %	100%	100%	25
2	18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Perizinan Terintegrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	25
2	18 6 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terkelolanya Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	100 %	100 %	100%	100%	25
2	18 6 2.01 1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	100 %	100 %	100%	100%	25

Pada tahun 2022, evaluasi menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja keuangan dibandingkan tahun sebelumnya. Penyerapan anggaran belanja langsung pada Tahun 2022 mencapai 89,61 % dari keseluruhan pagu anggaran. Faktor-faktor seperti efisiensi anggaran, perubahan kebijakan, dan sisa anggaran untuk pengadaan barang dan jasa berkontribusi pada penurunan capaian kinerja keuangan ini. Evaluasi mendalam diperlukan untuk memahami akar penyebab dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Meskipun ada penurunan capaian kinerja keuangan, namun sebagian besar program yang tercantum dalam Renja tahun 2022 telah dicapai dengan baik. Beberapa program yang menjadi prioritas Perangkat Daerah berhasil mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja ini dapat dicermati sebagai langkah awal yang memberikan harapan bagi pembangunan di masa mendatang.

Pada Program penunjang urusan pemerintahan daerah/kota, capaian kinerjanya masih dibawah 90% hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dan sisa anggaran untuk pengadaan barang. Dalam menghadapi permasalahan ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk penyesuaian anggaran pada perencanaan tahun berikutnya, pengawasan yang ketat, dan evaluasi terkait pelaksanaan program/kegiatan. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan program/kegiatan di masa mendatang dapat lebih efektif dan berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasar Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi, Ada 44 (empat puluh empat) Perizinan yang dilayani yaitu :

NO	NAMA IZIN
1	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
2	IZIN PENYAMBUNGAN JALAN DENGAN JALAN UMUM
4	IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN DENGAN LUAS SAMPAI 1000 M
5	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON FORMAL
6	IZIN PENYELENGGARAAN UNIT TRANSFUSI DARAH MILIK PMI
7	IZIN PENDIRIAN PRASARANA OLAH RAGA
8	IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT
9	IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI
10	IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI
11	IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER
12	IZIN JAGAL HEWAN
13	IZIN PRAKTIK PSIKOLOGIS KLINIS
14	IZIN LINGKUNGAN
15	IZIN MEMBAWA BENDA CAGAR BUDAYA KE LUAR DAERAH
16	PKL (IZIN RISET SURVAI PENELITIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN)
17	LSM (IZIN RISET SURVEI PENELITIAN UNTUK LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT)
18	IZIN REKLAME
19	IZIN WARUNG INTERNET DAN GAME NET
20	IZIN OPERASIONAL PANTI
21	IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG/BARANG
22	IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP
23	IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT
23	IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT
24	IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
25	IZIN MENDIRIKAN KLINIK
26	IZIN OPERASIONAL KLINIK

27	IZIN PENYELENGGARAAN RADIOLOGI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
28	IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/DOKTER SPESIALIS/GIGI SPESIALIS
29	SIPA (IZIN PRAKTEK APOTEKER)
	SIPB DAN SIKIB (IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA BIDAN)
30	SIPP DAN SIKP (IZIN PRAKTIK DN IZIN PERAWAT)
31	SIKTTK (IZIN TENAGA KERJA KEFARMASIAN)
32	SIK-ALM(IZIN PENYELANGGARAAN PRAKTIK AHLI TEGNOLOGI LABOLATORIUM MEDIK)
33	SIK-E DAN SIPE (IZIN KERJA PRAKTIK ELEKTROMEDIS)
34	SIPTGZ DAN SIKTGZ (IZIN KERJA PRAKTIK TENAGA GIZI)
35	SIKTS (IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN)
36	IZIN KERJA PEREKAM MEDIS
37	SIKRO (IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTROMETIS)
38	ISIPTKT (IZIN KERJA DAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL)
39	IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIPTW)
40	IZIN KERJA DAN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIKOT&SIPOT)
41	IZIN PRAKTIK PSIKOLOG (SIPPK)
42	IZIN KERJA TENAGA AHLI KESEHATAN MASYARAKAT (SIK-KESMAS)
43	IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP-TTD)
44	STPT (SURAT TANDA TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL)

Dalam melaksanakan pelayanan, DPMPTSP telah menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur), SPP (Standar Pelayanan Perizinan), maupun SPM (Standar Pelayanan Minimal) sehingga masyarakat pemohon izin dapat mengetahui persyaratan maupun pengurusan perizinan dengan mudah, jelas, transparan dan tepat waktunya.

Standar Pelayanan Perizinan (SPP) ini memberikan gambaran kepada seluruh stakeholder Kabupaten Purworejo khususnya pemangku kegiatan dan masyarakat pada umumnya akan kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Purworejo. Sebagai tindak lanjut Standar Pelayanan Perizinan (SPP), dilengkapi dengan dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana,

pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jaminan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana.

Dengan adanya Standar Pelayanan ini diharapkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melayani semua pemohon akan semakin mudah untuk dipantau, diawasi dan diukur oleh seluruh stakeholder sehingga secara penyelenggaraan pelayanan peizinan menjadi transparan dan akuntable. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel T-C. 30.

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Th. 2022 (thn n-2)	Th. 2023 (thn n-1)	Th. 2024 (thn n)	Th. 2025 (thn n+1)	Th. 2022 (thn n-2)	Th. 2023 (thn n-1)	Th. 2024 (thn n)	Th. 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi		□	10%	10%	10%	10%	105%	27%	111%	117%	
2	Realisasi Penanaman Modal	□		67,65M	74,41M	81,85M	90M	71,24 M	20 M	91 M	105 M	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah			88	88	88	88	94,42	88	88	88	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah			88	88	88	88	94,42	88	88	88	
5	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		□	5%	5%	5%	5%	100%	30%	100%	100%	
6	Program Promosi Penanaman Modal		□	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	100%	30%	100%	100%	
7	Program Pelayanan Penanaman Modal		□	100%	100%	100%	100%	100%	30%	100%	100%	
8	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		□	100%	100%	100%	100%	100%	30%	100%	100%	
9	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		□	100%	100%	100%	100%	100%	30%	100%	100%	
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		□	100%	100%	100%	100%	100%	30%	100%	100%	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi Masalah Utama dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Purworejo. DPMPTSP Kabupaten Purworejo pada saat ini melayani perizinan di Kabupaten Purworejo, adapun perizinan yang dilaksanakan di DPMPTSP Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi, Ada 44 (empat puluh empat) Perizinan yang dilayani.

Daya saing suatu daerah merupakan hal yang sangat penting bagi investor untuk menentukan keputusan berinvestasi. Investor cenderung akan memilih daerah yang lingkungan bisnis dengan kebijakan yang ramah, sehingga menjadikan investor berinvestasi dengan risiko yang dapat dikelola dan terkontrol. Sehingga pada akhirnya dengan perbaikan sistem perizinan diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini dirasa masih belum cukup untuk mewujudkan realisasi penanaman modal sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan peluang dan permasalahan yang ada di BKPM, baik dari aspek yang ada di dalam negeri secara nasional maupun regional serta global, dapat diperoleh isu strategis terkait penanaman modal. Adapun isu strategis BKPM Tahun 2020-2024 tersebut adalah :

1. Melambatnya pertumbuhan penanaman modal;
2. Penanaman modal yang belum berkualitas, dan;
3. Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan kebutuhan investor.

Berdasarkan kondisi lingkungan strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- a. Telah beroperasinya Mal Pelayanan Publik;
- b. Adany Kegiatan Gebyar Perizinan;
- c. Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SI IDA);
- d. Tingginya komitmen pimpinan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Kerjasama SDM di Internal DPMPTSP yang cukup baik;

KELEMAHAN (W):

- a. Kuantitas dan kualitas SDM masih kurang;
- b. Koordinasi antar instansi Teknis dalam pemberian Perizinan belum optimal;
- c. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Mekanisme dan tata cara pemberian perizinan di DPMPTSP Kab. Purworejo;

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- a. Tersedianya potensi investasi di Kabupaten Purworejo;
- b. Teknologi informasi berkembang pesat;
- c. Operasionalisasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat diharapkan oleh masyarakat;
- d. Dukungan dari DPRD Kab. Purworejo dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pelayanan prima.

ANCAMAN (T):

- a. Adanya persaingan pelayanan investasi dengan daerah lain;
- b. Adanya pungutan liar yang diakibatkan karena masyarakat tidak mengurus sendiri perizinan di DPMPTSP (menggunakan jasa pihak ketiga);
- c. Peraturan tingkat pusat sering berganti dan tidak konsisten.

Berdasarkan kondisi dan kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, isu-isu strategis yang akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Kemudahan Berusaha

Salah satu isu penting dalam penyelenggaraan tugas DPMPTSP adalah bagaimana memastikan proses investasi dan pengurusan izin usaha di Kabupaten Purworejo berjalan dengan mudah dan efisien. Upaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha akan meningkatkan daya tarik investasi di daerah tersebut.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Isu transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik juga menjadi hal yang penting. DPMPTSP harus memastikan bahwa proses pemberian izin dan pelayanan kepada investor atau pelaku usaha berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pengembangan Infrastruktur

DPMPTSP harus bekerja sama dengan instansi lain dalam pemerintahan kabupaten untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibutuhkan oleh investor atau pelaku usaha sudah memadai. Infrastruktur yang baik akan mendukung pertumbuhan bisnis dan investasi di daerah.

4. Pemberdayaan UMKM

DPMPTSP juga harus memperhatikan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mendorong perkembangan UMKM dapat menjadi pendorong ekonomi lokal yang kuat dan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

5. Investasi Berkelanjutan

Selain memikirkan investasi dalam jangka pendek, DPMPTSP juga harus memperhatikan investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Perhatian terhadap isu lingkungan dan sosial akan semakin penting bagi calon investor di masa depan.

6. Pelatihan Tenaga Kerja

Salah satu isu yang relevan adalah bagaimana DPMPTSP dapat membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan industri dan bisnis yang berinvestasi di wilayah tersebut.

7. Perizinan Online

Menghadapi perkembangan teknologi, penting bagi DPMPTSP untuk terus memperbarui sistem dan layanan mereka, termasuk implementasi perizinan online. Hal ini akan memudahkan investor dan pelaku usaha dalam mengurus izin dan mendapatkan layanan dari pemerintah.

8. Promosi Investasi

DPMPTSP perlu aktif dalam melakukan promosi dan memperkenalkan potensi investasi di Kabupaten Purworejo. Komunikasi yang efektif dan branding yang baik dapat menarik minat lebih banyak investor.

2.4 Review terhadap RKPD

Bahwa dalam proses penyusunan rancangan awal RKPD, hasil identifikasi permasalahan menjadi konsep rumusan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dengan menganalisa kebutuhan Perangkat Daerah kemudian dipilah antara program dan kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin.

Pada tahun 2024, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu telah mengusulkan tambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Tambahan anggaran untuk pemeliharaan kendaraan dinas;
2. Tambahan anggaran untuk pembayaran listrik, Telepon dan Air;
3. Tambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan gebyar perizinan
4. Tambahan anggaran untuk pembuatan Purworejo Investment Center;
5. Tambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan temu investor.

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persen fase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	2.903.935.987	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persen fase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	2.877.935.987	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	21.250.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	21.250.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	2.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	2.250.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.990.856.187	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.990.856.187	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bu	1.967.856.187	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bu	1.967.856.187	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	2.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semeste SKPD	26 Laporan	19.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semeste SKPD	26 Laporan	19.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	46.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	46.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	148.900.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	148.900.400	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	148.900.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	148.900.400	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	594.029.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	594.029.400	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	26.125.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	26.125.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.273.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.273.400	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	417.631.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	417.631.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	1 Jenis	102.900.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	1 Jenis	122.900.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	60.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	80 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	80 Unit	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	42.900.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	42.900.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		PERTUMBUHAN JUMLAH KEPEMINATAN PENANAMAN MODAL	5 %	91.011.500	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		PERTUMBUHAN JUMLAH KEPEMINATAN PENANAMAN MODAL	5 %	91.011.500	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Dokumen	26.007.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Dokumen	26.007.000	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5 %	26.007.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5 %	26.007.000	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	1 Dokumen	65.004.500	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	1 Dokumen	65.004.500	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	100 %	65.004.500	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	100 %	65.004.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		PERSENTASE NOMOR INDUK BERUSAHA YANG TERBIT TERHADAP JUMLAH KEPEMINATAN	99,50%	103.611.700	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		PERSENTASE NOMOR INDUK BERUSAHA YANG TERBIT TERHADAP JUMLAH KEPEMINATAN	99,50%	68.278.060	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	99,50%	103.611.700	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	99,50%	68.278.060	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	35.333.640	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota			
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	68.278.060	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	68.278.060	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		PERSENTASE PELAYANAN PENANAMAN MODAL SESUAI NSPK	100%	284.662.100	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		PERSENTASE PELAYANAN PENANAMAN MODAL SESUAI NSPK	100%	282.162.100	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100%	284.662.100	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100%	282.162.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	179.683.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	2.500.000	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	30 Kegiatan Usaha	99.985.900	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	179.683.200	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	30 Orang	2.493.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	30 Pelaku Usaha	2.493.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	40 Kegiatan Usaha	2.500.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	30 Kegiatan Usaha	99.985.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMENUHI KETENTUAN NSPK	100%	354.700.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMENUHI KETENTUAN NSPK	100%	354.700.000	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan	100%	354.700.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan	100%	354.700.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	249 Pelaku Usaha	337.630.808	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan Usaha	337.630.808	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	8 Kegiatan Usaha	17.069.192	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	249 Pelaku Usaha	17.069.192	
						Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	8 Kegiatan Usaha	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	1 Dokumen	32.562.600	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	1 Dokumen	32.562.600	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	1 Dokumen	32.562.600	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	1 Dokumen	32.562.600	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	32.562.600	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	32.562.600	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purworejo tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM dan asosiasi asosiasi dan perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah provinsi serta usulan Musrenbang kabupaten/kota. Sehingga pada tahun anggaran 2024 usulan program dan kegiatan masyarakat di Dinas PMPTSP tidak dianggarkan sesuai tabel 2.4

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan investasi, mempercepat proses perizinan, dan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan iklim investasi dan pelayanan terpadu. Penelaahan mengenai arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas DPMPTSP harus berfokus pada bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut mendukung peran DPMPTSP dalam memfasilitasi investasi dan pelayanan terpadu untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa poin yang relevan untuk penelaahan tersebut:

1. Fasilitasi Investasi dan Kemudahan Berusaha

Kebijakan nasional harus menekankan pentingnya memfasilitasi investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. DPMPTSP bertugas untuk menyederhanakan proses perizinan dan menyediakan pelayanan terpadu satu pintu bagi investor, sehingga kebijakan nasional harus mendukung upaya ini.

2. Penyederhanaan Perizinan

Kebijakan nasional harus mendorong penyederhanaan proses perizinan melalui integrasi pelayanan terpadu di berbagai sektor dan tingkat pemerintahan. DPMPTSP harus berperan aktif dalam mengkoordinasikan dan mengawasi penyederhanaan ini.

3. Peningkatan Infrastruktur

Prioritas pembangunan nasional harus memperhatikan pentingnya pengembangan infrastruktur yang mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. DPMPTSP harus berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan infrastruktur yang dibutuhkan oleh investor sudah memadai.

4. Pengembangan Kualitas SDM
Kebijakan nasional harus memberikan prioritas pada pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). DPMPTSP dapat berperan dalam menyediakan pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan sektor investasi dan industri.
5. Pemberdayaan UMKM
DPMPTSP harus berperan dalam memfasilitasi investasi yang berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan nasional juga harus mencerminkan komitmen untuk mendukung pertumbuhan UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal.
6. Investasi Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
Kebijakan nasional harus mencerminkan komitmen terhadap investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. DPMPTSP perlu memastikan adanya proses evaluasi dampak lingkungan dalam perizinan investasi.
7. Pemberdayaan Daerah dan Desentralisasi
Prioritas pembangunan nasional harus mencakup pemberdayaan daerah dan desentralisasi kebijakan. DPMPTSP di tingkat daerah harus memiliki peran aktif dalam mengimplementasikan kebijakan nasional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.
8. Digitalisasi dan Teknologi Informasi
Kebijakan nasional harus mendorong digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas DPMPTSP. Perizinan online dan pelayanan terpadu berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi.
9. Kolaborasi dengan Swasta dan Pihak Terkait
Kebijakan nasional harus mendorong kolaborasi antara sektor swasta, lembaga pemerintah, dan pihak terkait lainnya dalam mendukung investasi dan pengembangan ekonomi.
10. Monitoring dan Evaluasi:
Kebijakan nasional harus mencakup mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. DPMPTSP perlu berperan dalam menyediakan data dan informasi relevan untuk proses evaluasi ini.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dapat berdasarkan pada beberapa isu-isu penting yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo. perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo berdasarkan isu-isu penting yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo antara lain :

1. Peningkatan pelayanan perizinan dan investasi;
2. Pengembangan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan;
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang perizinan dan investasi.
4. Peningkatan komunikasi dan partisipasi publik dalam proses perizinan dan investasi.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Nilai Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Investasi	10%
		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal	81,85 M
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88
		Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, terdapat beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa faktor penting yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan:

1. Kebijakan Pemerintah

Program dan kegiatan DPMPTSP harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait investasi, perizinan, dan pengembangan ekonomi. Pengarahan dan arahan dari pemerintah merupakan landasan untuk merumuskan inisiatif DPMPTSP.

2. Pencapaian visi dan misi kepala daerah

Program dan kegiatan DPMPTSP harus selaras dan mendukung Pencapaian visi dan misi kepala daerah.

3. Peran dan Fungsi DPMPTSP

Faktor ini berkaitan dengan mandat dan tugas DPMPTSP sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perizinan dan pelayanan investasi. Program dan kegiatan harus sejalan dengan peran dan fungsi lembaga tersebut.

4. Anggaran dan Sumber Daya

Penyusunan program dan kegiatan harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia yang ada. Hal ini untuk memastikan program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif.

5. Monitoring dan Evaluasi

DPMPTSP perlu memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik untuk mengukur kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Data hasil evaluasi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan dan peningkatan di masa yang akan datang.

Dalam rencana penyusunan program dan kegiatan, DPMPTSP memiliki 6 (enam) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan pendanaan dari APBD Kabupaten Purworejo sebesar 2.559.584.332, Pendanaan PAD sebesar 576.934.119 dan DAK sebesar 354.700.000 dengan total anggaran sebesar Rp 3.491.218.451.

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purworejo dalam melaksanakan program kegiatan tahun anggaran 2024 sudah mendukung Pengarusutamaan gender yaitu pada Program Pelayanan Penanaman Modal pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota pada sub kegiatan :

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Pengarusutamaan gender merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja, termasuk di dalamnya disain dan pelaksanaan kebijakan, program, monitoring, dan evaluasi, serta dalam kerjasama dengan pihak luar dan atau pihak eksternal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dilakukanlah pemutakhiran sub kegiatan pada program dan kegiatan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pemutakhiran sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi data sebelumnya guna meningkatkan akurasi dan ketepatan informasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran pemerintahan daerah. Pemutakhiran sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi perencanaan pembangunan dan penganggaran di tingkat daerah, serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan secara lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun pemutakhiran sub kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Penyesuaian Subkegiatan terhadap Pemutakhiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	%	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	%
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Doku men	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen
2.18.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
2.18.01.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokum	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
2.18.01.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokum	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen
2.18.01.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokum	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan
2.18.01.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokum	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen
2.18.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
2.18.01.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2.18.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	2.18.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%
2.18.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / bulan	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bu
2.18.01.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan

Renstra PD No 38 Tahun 2022				Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 (Pemutakhiran)			
Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan
2.18.01.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan
2.18.01.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
2.18.01.2.06.9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	2.18.01.2.06.9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%
2.18.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD: rapat koordinasi (internal & eksternal), konsultasi dalam dan luar daerah dalam kurun waktu satu tahun	12 Laporan
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan
2.18.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan

Renstra PD No 38 Tahun 2022				Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 (Pemukhiran)			
Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan
2.18.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
2.18.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Jenis	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Jenis
2.18.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit
2.18.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80 Unit
2.18.01.2.09.0010				2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Renstra PD No 38 Tahun 2022				Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 (Pemutakhiran)			
Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERTUMBUHAN JUMLAH KEPEMINATAN PENANAMAN MODAL	%	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Doku men	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
2.18.02.2.01.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Doku men	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Doku men	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
2.18.02.2.02.4	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang umlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Renstra PD No 38 Tahun 2022				Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 (Pemutakhiran)			
Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE NOMOR INDUK BERUSAHA YANG TERBIT TERHADAP JUMLAH KEPEMINATAN	%	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	Doku men	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
2.18.03.2.01.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Doku men	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PELAYANAN PENANAMAN MODAL SESUAI NSPK	%	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	%	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
2.18.04.2.01.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiat an Usaha	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Renstra PD No 38 Tahun 2022				Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 (Pemukhiran)			
Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan
2.18.04.2.01.6	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha
2.18.04.2.01.7	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku Usaha
2.18.04.2.01.8	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal		2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	25 Kegiatan Usaha

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMENUHI KETENTUAN NSPK	%	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMENUHI KETENTUAN NSPK	%
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan	%	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan	%
2.18.05.2.01.4				2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan Usaha
2.18.05.2.01.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	249 Pelaku Usaha
2.18.05.2.01.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiat an Usaha	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	8 Kegiatan Usaha

Renstra PD No 38 Tahun 2022				Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 (Pemutakhiran)			
Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE JENIS DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DISEDIAKAN	%	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE JENIS DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DISEDIAKAN	%
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Doku men	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Dokumen
2.18.06.2.01.2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Doku men	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen

MATRIK RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAAAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tolok Ukur	Target
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								3.491.218.451					4.771.694.284
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA								2.640.868.751					3.599.586.948
2.18.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								21.250.000					25.500.000
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.000.000
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	2.250.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.500.000
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	2.250.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.500.000
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	2.250.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.500.000
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	2.250.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.500.000
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 laporan	7 Dokumen	2.250.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target	Target	
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	2.250.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.500.000
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 laporan	7 Dokumen	2.250.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.500.000
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	7 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.000.000
2.18.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.817.274.251					2.723.157.148
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	19 Orang/ bu	100%	1.794.274.251	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	2.700.157.148
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	2.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Target Ukur	Target	
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	an Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	26 Laporan	100 %	19.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	19.000.000
2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	2.000.000
2.18.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah								148.900.400					148.900.400
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD: rapat koordinasi (internal & eksternal), konsultasi dalam dan luar daerah dalam kurun waktu satu tahun	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	148.900.400			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	148.900.400
2.18.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								550.544.100					594.029.400
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	3 Laporan	26.125.000			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	26.125.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Target Program	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Target Ukur	Target	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	12 Lapora n	3 Laporan	150.273.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	150.273.400
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	12 Lapora n	3 Laporan	374.145.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	417.631.000
2.18.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								102.900.000					108.000.000
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	2 Jenis	60.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	65.000.000
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direh abilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	80 Unit	2 Jenis	15.000.000			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	43.000.000
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direh abilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	2 Jenis	27.900.000			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		375.000.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								87.700.340					244.000.000
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								23.573.520					90.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan						
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengensi Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusunnya Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	1 Dokumen	1 Dokumen	23.573.520	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	5 %	90.000.000
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota								64.126.820					154.000.000
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	64.126.820	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	100 %	154.000.000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								92.224.660					68.282.336
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								92.224.660					68.282.336
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Izin Usaha Terhadap Kepeminatan Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,5 %	1 Dokumen	99,5 %	92.224.660	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan	99,5 %	68.282.336
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								284.662.100					410.125.000
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								284.662.100					410.125.000
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	100 %	225.375.000

2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	500 Pelaku Usaha	100 %	179.683.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	100 %	135.750.000
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Pelaku Usaha	100 %	2.493.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	100 %	14.000.000
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Kegiatan Usaha	100 %	99.985.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	100 %	35.000.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								354.700.000					354.700.000
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								354.700.000					354.700.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Target Program	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Target Ukur	Target	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Keten tuan NSPK	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Usaha yang memenuhi Keten tuan Perizinan	Kab. Purworejo, Semua Kecamata n. Semua Kelurahan	100 %	7 Kegiata n Usaha	100 %	78.295.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Keten tuan NSPK	100 %	337.630.808
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Keten tuan NSPK	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implemen tasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Usaha yang memenuhi Keten tuan Perizinan	Kab. Purworejo, Semua Kecamata n. Semua Kelurahan	100 %	249 Pelaku Usaha	100 %	255.915.400	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Keten tuan NSPK	100 %	17.069.192

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Ketentuan NSPK	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Kegiatan Usaha	100 %	20.489.000					
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								31.062.600					95.000.000
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah								31.062.600					95.000.000
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Terkelolanya Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	31.062.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan	100 %	95.000.000
TOTAL								3.491.218.451					4.771.694.284	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yang merupakan program prioritas dalam RPJMD dan tugas pokok serta fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yaitu :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; dan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal sebesar 5% yang difokuskan pada penyusunan regulasi pengembangan iklim penanaman modal.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase ijin usaha dan/atau izin komersial/ izin operasional terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal sebesar 99,5%. Pencapaian indikator program ini difokuskan pada penyusunan Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal dan pelaksanaan kegiatan promosi.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase layanan perizinan sesuai SOP (Standar Operasional Pelayanan) sebesar 100% yang difokuskan pada penyediaan layanan perizinan sesuai SOP, penyuluhan perizinan pada masyarakat, serta didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan perizinan, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan, serta koordinasi pemberian fasilitas/insentif. Program ini mendukung program unggulan Purworejo Tangkas dengan rencana implementasi Optimalisasi Mall

Pelayanan Publik sebagai pusat rujukan: Pembuatan SIM, perpanjangan STNK, passport, event nikah gratis, taspen, dsb dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam :

1. Penyedia sarana dan prasarana pendukung Mal Pelayanan Publik
2. Pengendali kegiatan operasional dimana terdapat 24 gerai pelayanan yang terdiri dari Perangkat Daerah, Kementerian, Badan Usaha Milik Daerah dan Unit Layanan Pendukung lainnya.
3. Memberikan layanan konsultasi tentang perizinan dan penanaman modal untuk pelaku usaha dan investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Purworejo.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan sebesar 100% yang difokuskan pada pelaksanaan kegiatan pemantauan pembinaan, dan pengawasan penanaman modal.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Layanan Perizinan Terintegrasi sebesar 100%. Pencapaian indikator program ini difokuskan pada pengelolaan data informasi perizinan dan non perizinan serta pemeliharaan aplikasi perizinan selama 12 bulan.

Rencana program dan pagu anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diuraikan pada tabel 4.1 dan tabel 4.2.

**Tabel 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

NO	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PD / KET.
1.	PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.640.868.751	DPMPTSP
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	87.700.340	DPMPTSP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	92.224.660	DPMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	284.662.100	DPMPTSP
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	354.700.000	DPMPTSP
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	31.062.600	DPMPTSP
			3.491.218.451	

TABEL 4.2
SASARAN PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN

NO	PRGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten

3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Terbitnya Nomor Induk Berusaha
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Norma Standar Prosedur Dan Kriteria
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pelaku Usaha Yang Memenuhi Ketentuan Nspk
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya Jenis Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi

BAB V
PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah pada level Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Renstra perangkat daerah dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dikompilasi di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2024, ada beberapa program kegiatan yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu Program Promosi Penanaman Modal Dan Program Pelayanan Penanaman Modal dimana pada Program Promosi Penanaman Modal terdapat kegiatan untuk mendukung promosi penanaman modal guna menarik minat investor untuk berinvestasi di kabupaten purworejo. Pada Program Pelayanan Penanaman Modal terdapat kegiatan Gebyar Pelayanan Perizinan dimana kegiatan ini sangat memudahkan masyarakat atau pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan.

Keberhasilan program dan kegiatan yang ada pada Renja tersebut perlu didukung oleh anggaran, Sumber Daya Manusia yang profesional dan sarana prasarana yang memadai. Semoga Rancangan Renja yang telah disusun dapat menjadikan pedoman dalam pembangunan khususnya di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN